

BAB I

PENDAHULUAN

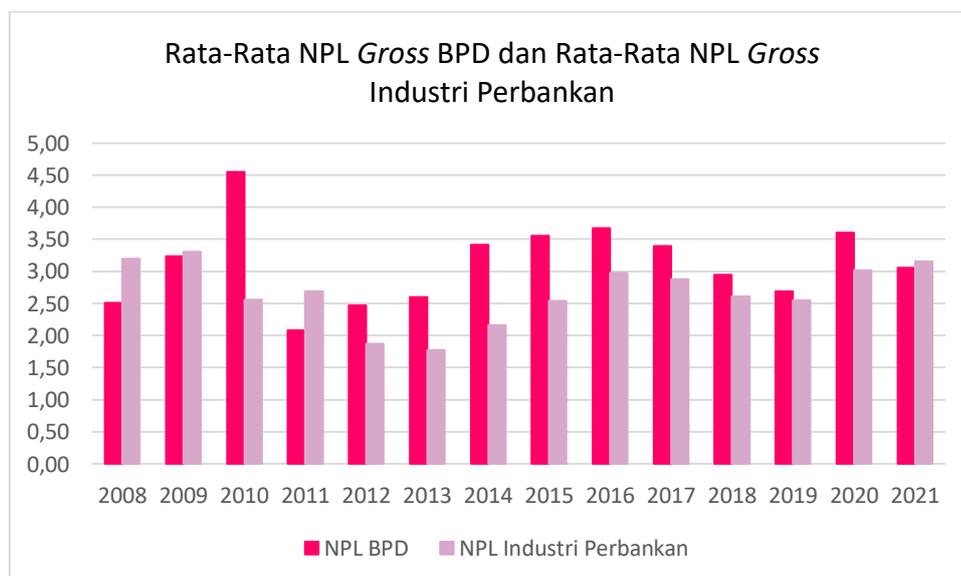
I.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga penting yang membantu masyarakat mengelola keuangan. Menurut (Ngurawan, Morasa, & Kapojos, 2021) bank merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta menawarkan jasa bank lainnya. Menurut (Mulyati, 2016) pada bukunya yang berjudul Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, membagi fungsi bank menjadi tiga. Pertama, *agent of trust* yaitu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana bank dengan berprinsip pada kepercayaan. Kedua, *agent of development* yaitu sebagai lembaga yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi dengan menjaga interaksi disektor moneter dan sektor rill salah satunya menjaga kelancaran kegiatan investasi distribusi konsumsi sebagai penyongsong pembangunan perekonomian. Ketiga, *agent of service* yaitu bank menawarkan jasa finansial kepada masyarakat. Salah satu jasa finansial yang ditawarkan oleh bank yakni jasa pemberian pinjaman atau penyaluran dana kepada masyarakat.

Kegiatan meminjamkan dana kepada masyarakat oleh bank dinamakan kredit. Dengan penyaluran kredit bank mendapatkan laba dari bunga pinjaman tersebut. Penyaluran kredit yang semakin besar kepada masyarakat tidak serta merta menandakan bahwa bank memiliki profit yang maksimal. Bank perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya (Mulyati, 2016). Pasalnya, saat bank berani untuk menyalurkan kredit yang terlalu besar kepada masyarakat tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian maka akan muncul potensi terjadinya kredit macet, kredit bermasalah, ataupun kredit diragukan. Dengan demikian, pendapatan yang didapatkan oleh bank akan menurun. Apabila kredit kurang lancar, kredit macet, maupun kredit diragukan terus berlanjut hingga jangka panjang maka rasio *Non Performing Loan* (NPL) akan semakin meningkat. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio antara jumlah kredit bermasalah

terhadap total kredit yang disalurkan (Peraturan Bank Indonesia, 2015). Rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi di suatu bank akan berdampak tidak hanya kepada laba saja tetapi likuiditas bank pun akan menurun dan berujung pada kebangkrutan bank. Selain itu, dengan tingginya *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional karena merosotnya kesempatan para pengusaha dalam memanfaatkan peluang bisnis dan investasi, termasuk penyediaan lapangan kerja, penerimaan devisa, substitusi impor akan ikut terpuruk (Subagyo, 2015).

Berdasarkan kelompoknya, bank umum konvensional dapat dibagi menjadi empat jenis bank yaitu bank persero, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, dan bank asing dan campuran. Berdasarkan pembagian keempat bank tersebut, terdapat bank yang memiliki aset besar dan bank yang memiliki aset yang kecil. Bank Pembangunan Daerah merupakan salah satu bank yang memiliki aset kecil. Menurut statistik perbankan Indonesia jumlah aset bank pembangunan daerah per Februari 2022 sebesar 868.149 milyar rupiah. Nilai tersebut jauh lebih kecil dari nilai aset bank swasta nasional dan bank persero. Meskipun demikian, bank pembangunan daerah tetap menyalurkan kredit untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, penyaluran kredit bank pembangunan daerah perlu untuk diawasi karena dalam kurun waktu 14 tahun kebelakang rata-rata nilai NPL bank pembangunan daerah lebih tinggi dari rata-rata NPL industri perbankan. Berikut adalah gambaran rata-rata NPL Bank Pembangunan Daerah dengan NPL industri perbankan.



Febri Nanda Marchela, 2023

DETERMINAN NON PERFORMING LOAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

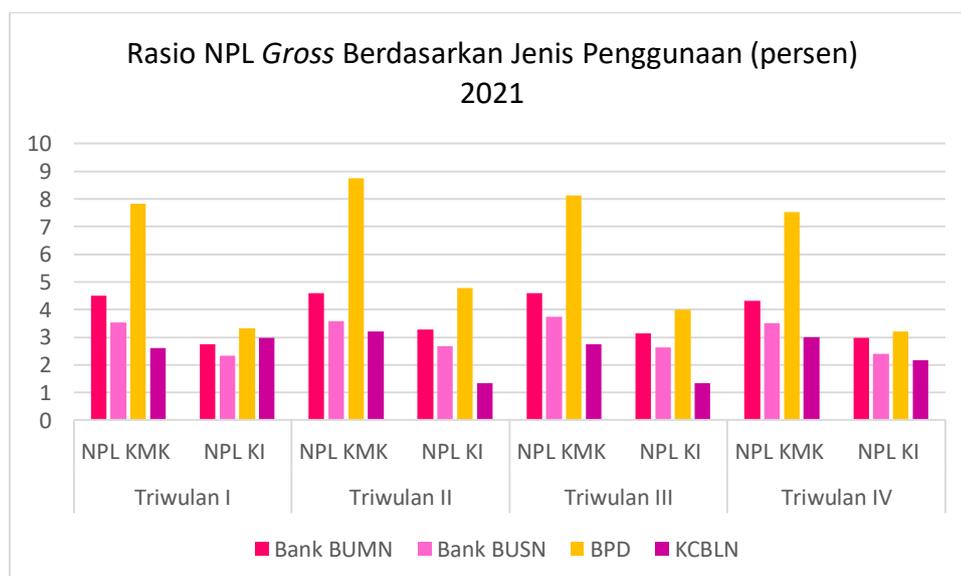
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Sumber: Laporan Tahunan dan Laporan Industri Perbankan, (2008-2021)

Gambar 1. Grafik Perbandingan Rata-Rata NPL Gross Bank Pembangunan Daerah dan Rata-Rata NPL Gross Industri Perbankan

Dari Gambar 1, dapat dilihat bahwa NPL BPD hampir selalu lebih tinggi daripada NPL industri perbankan. Tingginya rasio NPL BPD harus diwaspadai karena dapat memicu ketidaksehatan BPD. Semakin tinggi NPL maka semakin berisiko kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Perlu diketahui bahwa berdasarkan penggunaannya kredit dibagi menjadi tiga jenis yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumtif (KK). Dilansir dari laman resmi otoritas jasa keuangan, pengertian dari masing-masing jenis kredit tersebut yaitu pertama Kredit Modal Kerja (KMK) adalah pinjaman modal kerja perusahaan untuk membiayai aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku, piutang, dan lain-lain. Kedua, Kredit Investasi (KI) yaitu pinjaman jangka menengah ataupun panjang yang diberikan kepada perusahaan untuk merenovasi, memodernisasi, memperluas atau memulai proyek baru, seperti untuk membeli mesin, gedung, tanah untuk pabrik. Ketiga, Kredit Konsumtif (KK), yaitu pinjaman untuk kegiatan konsumsi berupa barang dan jasa melalui pembelian, penyewaan, dan sebagainya. Selama tahun 2021 dalam empat triwulan berturut-turut, NPL kredit modal kerja dan NPL kredit investasi Bank Pembangunan Daerah masih tergolong tinggi. Padahal kredit modal kerja merupakan jenis kredit yang paling banyak disalurkan oleh industri perbankan di tahun 2021 triwulan IV yaitu sebesar 46.14 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).



Febri Nanda Marchela, 2023

DETERMINAN NON PERFORMING LOAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

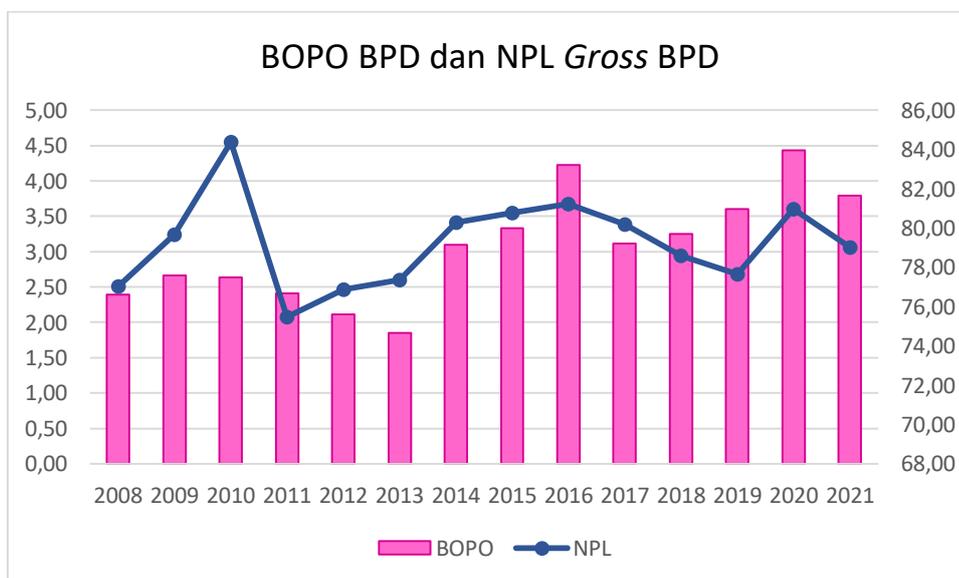
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Sumber : Laporan Industri Perbankan Indonesia 2021

Gambar 2. Grafik Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan 2021

Tingginya NPL Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada jenis kredit modal kerja dan kredit investasi disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengawasi pinjaman dan kemampuan SDM yang kurang (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Meskipun memiliki keterbatasan BPD harus tetap menyalurkan kreditnya secara efektif dan hati-hati untuk meminimalisasi kerugian. Berdasarkan SEKI (Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia) tahun 2020 kredit BPD didominasi atas penyaluran kepada konsumsi rumah tangga sebesar 339,916 miliar rupiah yang mana pada sektor rumah tinggal sebesar 22,844 miliar rupiah dan sektor lainnya sebesar 315,692 miliar rupiah. Sedangkan pinjaman berdasarkan lapangan usaha tahun 2020 BPD menyalurkan pinjaman sebesar 147,926 miliar rupiah yang didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 38,282 miliar rupiah serta konstruksi 36,212 miliar rupiah.

Efektivitas penyaluran kredit dapat dilihat dari kinerja bank. Indikator kinerja bank terdiri dari enam dimana dua diantaranya adalah ROA dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Definisi BOPO menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional untuk menentukan seberapa efisien dan operasional sebuah bank. Rasio BOPO yang besar mengindikasikan bahwa bank belum dapat mengelola biaya operasional dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa bank memiliki efisiensi yang rendah.



Febri Nanda Marchela, 2023

DETERMINAN NON PERFORMING LOAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

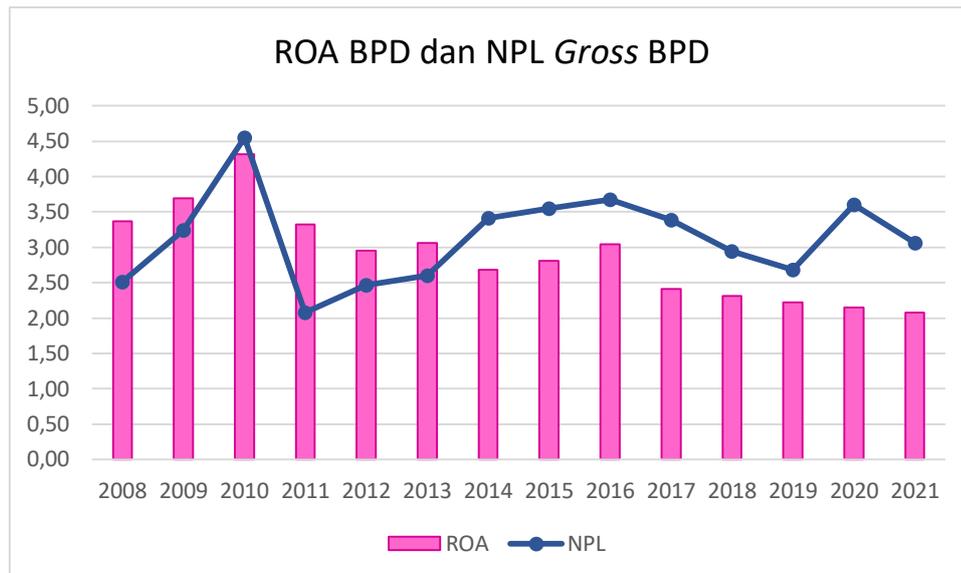
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Sumber : Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah, (2008-2021)

Gambar 3. Grafik Perbandingan BOPO dan NPL Gross Bank Pembangunan Daerah

Hipotesis *bad management* oleh Berger dan DeYoung (1997) menyebutkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang buruk dapat mengakibatkan penurunan kinerja, efisiensi, dan efektivitas dan berujung pada kenaikan NPL. BOPO merupakan salah satu faktor internal bank yang juga merupakan indikator penentu tingkat efisiensi suatu perbankan. Apabila bank semakin efisien dalam mengelola biaya operasionalnya maka bank dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan demikian, disimpulkan bahwa dengan asumsi faktor lain diabaikan, bank mampu menghasilkan keuntungan maksimal ketika bank tersebut mampu mengendalikan biaya operasionalnya. Ketika bank mengalami kesulitan dalam mengendalikan biaya operasionalnya maka bank akan menggeser beban tersebut kepada debitur dengan cara menaikkan suku bunga pinjaman guna menstabilkan keuntungan bank (Azizzah, Setiawan, & Kristianingsih, 2021). Hal tersebut akan memicu resiko gagal bayar kepada bank sehingga rasio NPL bank akan meningkat. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dengan asumsi faktor lain diabaikan (faktor lain dianggap tidak berpengaruh), ketika BOPO mengalami kenaikan maka NPL juga akan mengalami kenaikan.

Jika dilihat dari Gambar 3 terlihat bahwa pada saat BOPO mengalami kenaikan belum tentu NPL bank mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 saat BOPO naik nilai NPL BPD mengalami penurunan. Tahun 2012 dan 2013 saat BOPO mengalami penurunan justru nilai NPL BPD mengalami peningkatan. Tahun 2018 dan 2019 ketika BOPO BPD mengalami peningkatan tetapi nilai NPL justru menurun. Namun demikian, penelitian oleh (Mamahit & Tulung, 2022) menemukan hasil bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap NPL. Perbedaan antara data yang ada dengan penelitian-penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk meneliti kembali variabel BOPO terhadap NPL.

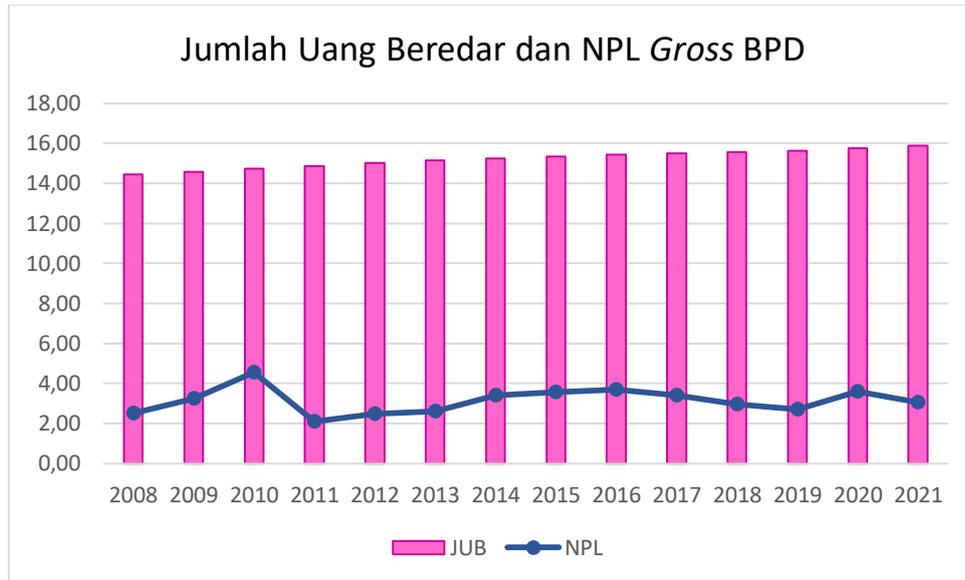


Sumber : Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah, (2008-2021)

Gambar 4. Grafik Perbandingan ROA dan NPL Gross Bank Pembangunan Daerah

Faktor internal selanjutnya adalah *Return On Aset* (ROA). ROA merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya (Solikhah, Susyanti, & Wahono, 2018). Hipotesis moral *hazard* oleh Berger dan DeYoung (1997) mengatakan bahwa ketika suatu manajemen akan mengambil keputusan dengan resiko yang tinggi maka manajemen akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan tetapi jika terjadi kerugian maka yang menanggung resiko kerugian tersebut adalah pihak lain. Hal tersebut juga sering terjadi pada perbankan dimana bank berani mengambil resiko guna memaksimalkan pendapatan dengan cara memberikan kredit tanpa melihat kelayakan debitur sehingga memicu kenaikan resiko kredit bermasalah atau kenaikan *Non Performing Loan* (NPL). Dari penjelasan tersebut maka dengan asumsi faktor lain diabaikan (faktor lain dianggap tidak berpengaruh) maka ketika ROA bank mengalami kenaikan maka NPL akan mengalami penurunan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian (Khan, Siddique, & Sarwar, 2020) yang menemukan hasil negatif antara ROA dan NPL. Ketika ROA bank tinggi maka bank cenderung berhati-hati dalam meminjamkan kredit kepada masyarakat karena bank tidak ingin menghadapi resiko kredit bermasalah dan mengorbankan labanya artinya ketika nilai ROA tinggi maka NPL menurun. Jika dilihat dari Gambar 4, pada tahun 2009, 2010, 2013, 2015, 2016, ketika ROA mengalami peningkatan

tetapi nilai NPL mengalami peningkatan pula. Kemudian pada tahun 2011, 2017, 2018, 2019, 2021 ketika ROA mengalami penurunan nilai NPL juga mengalami penurunan pula. Penelitian oleh (Kinanti, 2017) menemukan hasil dimana ROA tidak berpengaruh terhadap NPL. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meneliti variabel ROA terhadap NPL BPD.



Sumber : Bank Indonesia dan Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah, (2008-2021)

Gambar 5. Grafik Perbandingan Jumlah Uang Beredar dan NPL Gross Bank Pembangunan Daerah

Variabel makroekonomi yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Loan* yaitu jumlah uang beredar. Di Indonesia, variabel jumlah beredar masih jarang diteliti terhadap *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah sehingga hal ini menjadi sebuah keterbaruan penelitian. Selain itu, jumlah uang beredar merupakan variabel yang penting untuk diteliti karena dapat dilihat dari Gambar 5 jumlahnya selalu naik setiap tahun sehingga hal tersebut merupakan sinyal bagi Bank Pembangunan Daerah agar selalu memantau kondisi JUB yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan diharapkan dapat membuat kebijakan yang sesuai untuk kemajuan BPD itu sendiri.

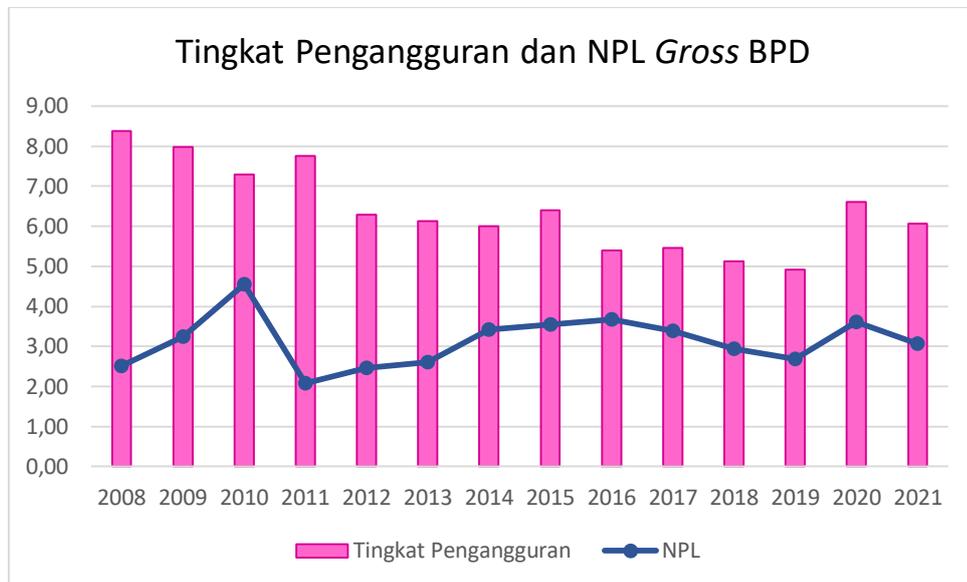
Saat ini teknologi sangat berkaitan dengan kehidupan manusia bahkan *financial technology (fintech)* telah merajalela. Adanya *fintech* membuat pembayaran maupun pendanaan menjadi lebih mudah. Kini telah banyak fitur dari dompet digital yang menyediakan pemberian pinjaman secara *online* sehingga banyak kredit yang tersalurkan ke masyarakat. Hal tersebut merupakan sinyal bagi

BPD untuk terus melihat perkembangan JUB dan melihat peluang untuk kemajuan BPD itu sendiri. Bank Pembangunan Daerah dapat melihat tren jumlah keuangan seperti misalnya jumlah uang atas transaksi digital dan menjadikannya sebagai peluang. Misalnya dengan mengubah sistem perbankannya menjadi bank digital ataupun membuat fitur seperti yang dilakukan oleh *fintech* masa kini yang dapat mempermudah nasabah dalam menggunakan jasa bank serta dapat meningkatkan kualitas manajemen perbankan karena penggunaan teknologi sehingga lebih efisien.

Jumlah uang beredar menurut (Sari & Setiawat, 2020) dibagi menjadi dua arti yakni pengertian jumlah uang beredar secara sempit dan luas. Uang beredar yang didefinisikan secara sempit adalah uang yang beredar ditambah giro yang dimiliki oleh individu, bisnis, atau lembaga pemerintah, dan uang beredar yang didefinisikan secara luas terdiri dari uang yang beredar, giro, dan uang kuasi. Teori kuantitas uang oleh Irving Fisher mengatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar berbanding lurus dengan perubahan harga barang. Berkurangnya jumlah uang beredar menimbulkan penurunan harga barang. Ketika harga secara agregat mengalami penurunan secara terus-menerus akan menimbulkan deflasi.

Terjadinya deflasi menandakan jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang sehingga berimbas pada penurunan permintaan atas barang dan jasa. Hal tersebut akan berdampak pada pendapatan pelaku usaha yang menjadi menurun. Dengan begitu pelaku usaha akan kesulitan membayarkan utangnya kepada pihak kreditur akibat pendapatan yang menurun. Hal tersebut juga tercantum dalam teori deflasi utang Irving Fisher dimana ketika harga dan upah turun, tetapi nominal utang dan pembayaran bunga tidak mengalami penurunan, maka peminjam menghadapi tekanan yang meningkat pada kemampuan mereka untuk membayar dan beresiko gagal bayar. Dapat disimpulkan bahwa ketika jumlah uang beredar turun maka rasio *Non Performing Loan* akan mengalami kenaikan. Penelitian (Anita, Tasnova, & Nawar, 2022) juga menemukan hasil dimana jumlah uang beredar berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Dari Gambar 5, terlihat ketika jumlah uang beredar naik nilai NPL justru mengalami kenaikan pula seperti pada tahun 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2020. Hal tersebut

merupakan kontradiksi antara data yang ada, teori Irving Fisher, dan hasil penelitian terdahulu sehingga variabel jumlah uang beredar perlu untuk diteliti kembali.



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah, (2008-2021)

Gambar 6. Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran dan NPL Gross Bank Pembangunan Daerah

Kemudian, variabel makroekonomi yang juga diteliti dalam penelitian ini yaitu tingkat pengangguran. Menurut teori pengangguran Keynes (1936), pengangguran disebabkan oleh rendahnya permintaan agregat. Untuk meningkatkan permintaan agregat perlu dilakukan penurunan suku bunga yang berujung pada penurunan biaya pinjaman. Penurunan biaya pinjaman membuat debitur dapat meminjam uang dan membayar kembali pinjaman di masa depan. Meningkatnya aktivitas pinjaman akan meningkatkan permintaan barang yang pada akhirnya mendorong perusahaan untuk mempekerjakan pekerja. Alhasil pengangguran menjadi berkurang. Dari teori Keynes tersirat bahwa pengangguran yang meningkat memicu debitur gagal membayar utangnya. Hal tersebut terjadi karena biaya pinjaman tidak berkurang sedangkan pendapatan mereka berkurang akibat hilangnya pekerjaan sehingga debitur kesulitan untuk membayar pinjaman pada bank. Sejalan dengan penelitian (Soh, 2019) yang menemukan hasil bahwa pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap NPL. Artinya, ketika tingkat pengangguran meningkat, nilai NPL juga meningkat. Berdasarkan grafik perbandingan tingkat pengangguran dan NPL BPD dapat dilihat bahwa pada saat

pengangguran meningkat nilai NPL justru mengalami penurunan seperti tahun 2011 dan 2017. Kemudian pada tahun 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 pengangguran mengalami penurunan tetapi nilai NPL mengalami peningkatan. Penelitian oleh (Lubis & Mulyana, 2021) menemukan hasil dimana pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL. Adanya perbedaan antara data dengan teori dan penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk meneliti variabel pengangguran lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang serta melihat penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk menggunakan variabel makroekonomi seperti jumlah uang beredar, tingkat pengangguran serta variabel mikroekonomi seperti BOPO dan ROA. Hal ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap *Non Performing Loan*. Judul penelitian yang dipilih yaitu *Determinan Non Performing Loan Pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia*.

I.2 Perumusan Masalah

Bank Pembangunan Daerah memiliki fungsi sebagai lembaga penyalur kredit kepada masyarakat. Dalam penyaluran kreditnya bank memiliki indikator yakni *Non Performing Loan* (NPL). Tingginya rasio NPL dalam jangka panjang dapat mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan sehingga rasio NPL suatu bank sebaiknya selalu diawasi dan dijaga agar penyaluran kredit kepada masyarakat berjalan lancar. Lancarnya penyaluran kredit kepada masyarakat mengindikasikan lancarnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan, NPL BPD dari tahun 2008 hingga 2021 seringkali lebih tinggi daripada NPL industri perbankan secara umum. Selain itu menurut laporan profil industri perbankan tahun 2021, NPL kredit modal kerja dan kredit investasi pada BPD dari triwulan I hingga triwulan IV nilainya lebih tinggi daripada bank-bank lain. Padahal kredit modal kerja merupakan jenis kredit yang paling banyak disalurkan oleh industri perbankan di tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa BPD masih kurang optimal dalam menyalurkan kreditnya karena masih berfokus pada penyaluran kredit konsumsi saja. Adanya perbedaan antara teori dengan data serta penelitian terdahulu juga mendorong peneliti untuk meneliti kembali mengenai NPL Bank Pembangunan Daerah. Berdasarkan latar

belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?
2. Bagaimana pengaruh ROA terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?
3. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran daerah terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?

I.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh BOPO terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ROA terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada banyak pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi di masa mendatang mengenai faktor makroekonomi dan mikroekonomi yang mempengaruhi NPL BPD. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu bagi penelitian selanjutnya, maupun bagi instansi-instansi tertentu.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Bank Pembangunan Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Bank Pembangunan Daerah terkait penyaluran kreditnya kepada masyarakat.

- b) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi tentang faktor yang mempengaruhi NPL Bank Pembangunan Daerah.

c) Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca mendapatkan informasi tambahan dan menjadi mengerti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPL BPD.